

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah merambat ke semua aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini membawa pergeseran yang signifikan dalam semua dimensi kehidupan manusia. Modernisasi menuntut kemampuan manusia untuk beradaptasi secara baik dan cepat melalui berbagai cara. Karena itu, negara-negara maju di kawasan Utara sejauh ini sedang berkonsentrasi penuh dalam menciptakan berbagai inovasi baru melalui pengembangan teknologi dan riset ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Kendatipun demikian, di tengah merambatnya proses modernisasi manusia juga dihadapkan pada sebuah persoalan fundamental yang sering kali menghambat laju perkembangan tersebut yaitu kemiskinan.¹

Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum guna mencapai taraf hidup yang layak. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap hari seperti kebutuhan pangan dan non pangan.² Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang berada pada situasi atau keadaan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.³ Definisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah

¹ Indah Maya Amirtha et. al, "Globalization and Its Influence on Social Inequalities and Poverty Alleviation in Indonesia", *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 2, No.1 (2015), p. 26.

² Ikasari Heniyatun, "Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro", dalam *kemenkeu.go.id*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3155-kemiskinan-makro-dan-kemiskinan-mikro.html>, diakses pada 16 April 2025.

³ Badan Pusat Statistik, *Penjelasan Data Kemiskinan*, dalam *bps.go.id*, <https://web-api.bps.go.id/download.php.pdf>, hlm. 1, diakses pada 27 Agustus 2025.

persoalan multidimensional. Karena itu, secara praksis kemiskinan itu sendiri tidak mudah untuk diukur dan membutuhkan konsensus umum untuk mencapai suatu pendekatan pengukuran yang tepat.⁴

Sejarah peradaban manusia tidak pernah terlepas dari persoalan kemiskinan. Konsep tentang kemiskinan itu sendiri memiliki cakupan yang luas dan kompleks, sehingga pada umumnya kemiskinan selalu menjadi sebuah persoalan yang cukup sulit diatasi. Secara spesifik, kemiskinan merupakan sebuah persoalan yang sangat lazim terjadi dan ditemukan di berbagai wilayah dari tingkat lokal hingga internasional. Kenyataan yang paling sering ditemukan adalah bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia lainnya seperti rendahnya akses kesehatan, pendidikan, standar hidup rendah, sanitasi, kondisi lingkungan yang buruk dan ketidakberdayaan dalam hidup.⁵

Persoalan kemiskinan hingga saat ini telah menjadi permasalahan global yang sedang dihadapi oleh banyak negara di belahan dunia. Persoalan utama yang dapat dilihat ialah bahwa kemiskinan sangat memengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebuah negara. Kenyataan ini bertendensi menciptakan penderitaan bagi masyarakat, terutama pada negara-negara berkembang di kawasan Selatan. Penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan telah menyebabkan ancaman dan bahaya bagi masyarakat di negara-negara berkembang selama bertahun-tahun. Secara sosio politis, mereka ini tidak memiliki akses untuk berkuasa dan membela hak-haknya, sehingga satu-satunya cara untuk terus bertahan hidup adalah dengan menerima kemiskinan yang mereka alami setiap hari.⁶

Realitas hari-hari ini menggambarkan sebuah fenomena yang sedang terjadi pada masyarakat global yaitu adanya tendensi persaingan antarpribadi atau kelompok dalam

⁴ *Ibid.*

⁵ Salmiwati Rumadan, *Berbagai Perspektif Kemiskinan* (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2022), hlm. 9.

⁶ Julius Stefanus Sibagariang, "Kemiskinan dan Ketidakadilan: Kajian Etis Teologis tentang Kemiskinan sebagai Akibat Ketidakadilan", *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika*, Vol 6, No. 2 (September, 2024), hlm. 1-2.

berbagai aspek kehidupan. Terdapat perspektif dalam masyarakat yang menganggap bahwa setiap orang yang memiliki pencapaian baik dalam aspek ekonomi dikategorikan sebagai kelompok yang berprestasi, sedangkan setiap orang yang sedang dalam kondisi terpuruk secara ekonomi dikategorikan sebagai kelompok miskin. Kenyataan ini menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat terhadap kemiskinan sering kali bertolak dari kondisi hidup empiris seseorang. Cara pandang tersebut mendorong setiap orang yang dikategorikan sebagai orang miskin untuk memiliki pencapaian ekonomi yang baik melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti melakukan pencurian, perampokan, bisnis ilegal dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan menjadi momok yang menakutkan, karena bertendensi menghambat kemajuan dalam masyarakat khususnya pada masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia.⁷

Secara historis, persoalan kemiskinan di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaannya dari Belanda akibat beban hutang eksternal atau utang luar negeri yang terus naik hingga sekarang. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan Soekarno terus berupaya untuk melawan hegemoni dunia barat yang mengusung sistem ekonomi kapitalis yang di dalamnya terkandung imperialisme ekonomi. Dengan kata lain, kehadiran lembaga keuangan internasional IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia yang menawarkan pinjaman-pinjaman kepada negara merupakan sebuah upaya penjajahan baru atas Indonesia secara ekonomis.⁸ Kendatipun demikian, upaya Soekarno tersebut gagal akibat terjadinya peralihan kekuasaan kepada Soeharto pada tahun 1967.⁹

Sejak awal pemerintahannya, Soeharto mulai menerapkan pelbagai kebijakan politik melalui kerja sama ekonomi dengan dunia barat. Kebijakan taktis pada awal pemerintahannya ini berdampak sangat signifikan bagi perkembangan perekonomian

⁷ Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 98-99.

⁸ Alexander Jebadu, *Bahtera Terancam Karam; Lima Masalah Sosial Ekonomi dan Politik yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 8.

Indonesia selama jangka waktu yang panjang. Upaya peningkatan di sektor ekonomi ini didukung sepenuhnya juga oleh kebijakan trilogi prinsip pembangunan yaitu; *Pertama*, pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. *Ketiga*, stabilitas nasional.¹⁰ Ketiga prinsip (trilogi) pembangunan ini berhasil meningkatkan sektor ekonomi dan pembangunan Indonesia secara signifikan. Namun, perkembangan dan kemajuan ini dihambat oleh pelbagai persoalan krusial lainnya yang masif terjadi saat itu seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelanggaran hak-hak asasi manusia dan eksploitasi kekayaan alam negara yang dilakukan secara besar-besaran oleh perusahaan transnasional.¹¹

Eksplorasi kekayaan alam negara tersebut merupakan salah satu kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang lahir sebagai akibat dari pengaruh IMF terhadap pengambilan kebijakan politik pemerintahan Orde Baru saat itu. IMF sepenuhnya mengintervensi para elit politik pemerintahan Orde Baru agar melegalkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Tahun 1967, serta Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) Tahun 1968. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) ini merupakan hasil konferensi rahasia di Jenewa yang terjadi pada tahun 1966 yang membahas tentang investasi asing di Indonesia. Sejumlah proyek asing mendapat legitimasi dan afirmasi positif berkat undang-undang ini, antara lain; privatisasi, deregulasi dunia usaha dan devaluasi mata uang Indonesia. Upaya IMF tersebut bertujuan agar kegiatan investasi korporasi-korporasi asing di Indonesia tidak dihambat atau bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.¹²

Untuk meningkatkan stabilitas politik Orde Baru, IMF menginstruksikan kepada pemerintahan Orde Baru agar memberikan dana yang besar bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

¹¹ *Ibid*.

¹² Dewita Harthanti dan Nuryana, "Pengaruh IMF (*International Monetary Fund*) dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi-Politik Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1967-1974)", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 4 (Juni, 2018), hlm. 27-28.

mengayomi IMF dalam melaksanakan pelbagai kepentingannya di Indonesia. Dana yang diberikan ini sepenuhnya bersumber dari IMF itu sendiri atau dalam hal ini pemerintahan Orde Baru berhutang kepada IMF untuk membiayai berbagai kegiatan politik dan militer di Indonesia. Sokongan dana yang besar dari IMF membuka peluang besar bagi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh pemerintahan Orde Baru.¹³

Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru hingga sekarang masa Reformasi, beban utang negara terus meningkat setiap hari. Meskipun pelbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru telah berhasil melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran, namun biaya pembangunan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut sangat tinggi. Karena itu, pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri yang hingga sekarang telah berubah menjadi salah satu faktor utama bagi terciptanya persoalan kemiskinan ekonomi masyarakat Indonesia.¹⁴ Dalam pertautannya dengan itu, Alexander Jebadu mengemukakan sekurang-kurangnya ada lima masalah yang paling menantang dan serius yang sedang dihadapi Indonesia hari-hari ini. Secara eksplisit Alexander Jebadu menulis:

Tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa kemajuan dan perkembangan positif di berbagai sektor yang telah dicapai Indonesia hingga dewasa ini - sebuah tema lain yang berada di luar jangkauan studi ini untuk dipresentasikan di sini. Meskipun telah mencapai sejumlah kemajuan, ada beberapa tantangan serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini seperti peningkatan kesenjangan antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin, urbanisasi, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi publik yang merajalela dan peningkatan invasi perusahaan-perusahaan transnasional ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.¹⁵

Lima masalah yang dikemukakan di atas merupakan persoalan-persoalan yang menggerogoti sektor sosial ekonomi dan politik di Indonesia, serta bertendensi

¹³ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁴ Andi Ika Fahrika, SE.,M.Si dan Zulkifli, S.Pd.,M.Si, "Sejarah Perekonomian Indonesia", dalam Dahlia, S.Pd.,M.Si,M.Ak dan Juhasdi, SE.,MM (ed), *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Makasar: Penerbit Yayasan Barcode, 2020), hlm. 13.

¹⁵ Alexander Jebadu, *op. cit*, hlm. 19.

membawa Indonesia ke ambang kehancuran. Para elit politik yang berkuasa serentak dituntut untuk memikirkan kembali pelbagai langkah dan kebijakan sosial ekonomi dan politik yang kontra terhadap kepentingan atau kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa. Dalam kondisi tertentu, sebagai sebuah bangsa yang sudah merdeka dari kolonialisme, berbagai persoalan sosial ekonomi dan politik yang sedang melanda bangsa Indonesia tersebut berpeluang menciptakan kesenjangan yang besar dalam pelbagai sektor krusial masyarakat, terutama membuka peluang bagi meningkatnya angka kemiskinan yang sangat signifikan pada setiap tahunnya.

Berhadapan dengan situasi semacam ini, Gereja sebagai sebuah institusi keagamaan yang hidup dan berkarya di tengah dunia turut menunjukkan perhatiannya melalui pelbagai cara yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perhatian Gereja ini tampak dalam cara penanganan dan kepeduliannya yang tertuang secara jelas dalam Kitab Suci, Tradisi dan ajaran-ajaran teologis dan sosial yang dikeluarkan oleh Magisterium Gereja. Cara-cara tersebut menegaskan dimensi sosial Gereja yang turut mengambil bagian secara penuh dalam pengalaman nyata hidup manusia. Kehadiran Gereja di tengah dunia memberikan pengharapan baru bagi setiap anggotanya akan tanda solidaritas Allah.¹⁶ Aspek keterlibatan sosial Gereja ini secara eksplisit dijelaskan dalam Kompendium Ajaran Sosial Gereja sebagai berikut:

Gereja, yang ambil bagian dalam kegembiraan dan harapan umat manusia, dalam kecemasan dan dukacitanya, berdiri bersama setiap lelaki dan perempuan dari setiap tempat dan masa, guna membawa bagi mereka kabar baik tentang Kerajaan Allah, yang di dalam Yesus Kristus telah datang dan senantiasa hadir di antara mereka. Di tengah-tengah umat manusia dan di dalam dunia, Gereja adalah sakramen cinta kasih Allah, dan karenanya merupakan sakramen harapan yang paling berlimpah, yang mengilhami dan menopang setiap ikhtiar yang autentik untuk serta komitmen terhadap pembebasan dan kemajuan manusia. Gereja hadir di antara umat manusia sebagai kemah pertemuan Allah, “kemah Allah di tengah-tengah manusia” (bdk. Why 21:3), sehingga manusia tidaklah sendirian, tersesat dan ketakutan dalam tugasnya menjadikan dunia ini

¹⁶ Maridina Makiliuna, dkk, “Ajaran Sosial Gereja Melihat Kemiskinan dan Keadilan Melalui Lensa Mater et Magistra”, *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vol. 4, No. 2 (Malang: Februari 2024) hlm. 39.

lebih manusiawi; begitulah manusia menemukan dukungan dalam cinta kasih Kristus yang menebus. Sebagai pelayan keselamatan Gereja tidak berada dalam matra abstrak atau melulu rohaniah, tetapi di dalam konteks sejarah dan konteks dunia di mana manusia berdiam. Di sini manusia dijumpai oleh cinta kasih Allah dan oleh panggilan untuk bekerja sama dalam rencana ilahi.¹⁷

Aspek keterlibatan sosial Gereja dalam dunia merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan *bonum commune* (kebaikan bersama), sebagai salah satu intisari pewartaan Kerajaan Allah di tengah dunia.¹⁸ Salah satu tanggapan aktual Gereja terhadap persoalan sosial dunia ialah diterbitkannya Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* oleh Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik ini merupakan bentuk keterlibatan sosial Gereja dalam menanggapi persoalan sosial manusia, secara khusus mengenai masalah kemiskinan. Dalam konteks ini, kehadiran Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS) bukan bertujuan untuk memberikan satu pedoman khusus mengenai hal-hal yang bersifat teknis yang perlu dan harus dilakukan oleh Gereja, melainkan memberikan semacam penekanan akan tugas Gereja dalam urusan perilaku moral manusia. Hal itu berarti bahwa keterlibatan sosial Gereja pada hakikatnya berfokus pada urusan kemanusiaan, secara khusus pembentukan suara hati bagi setiap orang yang merasa terpenggil untuk mencari dan menemukan solusi bagi setiap permasalahan sosial yang dialami manusia.¹⁹

Pada bagian pendahuluan Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menyebut dasar keprihatinan sosial Gereja terarah kepada perkembangan sejati manusia. Tentang hal ini, Paus Yohanes Paulus II menulis: “Keprihatinan sosial dari Gereja selalu terungkap melalui pelbagai cara. Keprihatinan tersebut terarah pada perkembangan sejati dari manusia dan masyarakat untuk menghormati serta

¹⁷ Komisi Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, penerj. Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung (Mauere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 41-42.

¹⁸ Vinsensius Bawa Toron dan Yohanes Marinus, “Ajaran Sosial Gereja tentang Membangun Keluhuran Martabat Manusia sebagai Citra Allah”, *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi dan Budaya*, Vol. 01, No. 01 (Larantuka: Februari, 2018), hlm. 3.

¹⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme; Memahami Keterlibatan Sosial Gereja* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2003), hlm. 38.

memajukan semua dimensi pribadi manusia”.²⁰ Selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa dalam mengupayakan aspek keprihatinan sosial, “Gereja berupaya membimbing dan mengarahkan umat untuk menjawab panggilan sebagai pembangun-pembangun yang bertanggung jawab atas masyarakat duniawi, juga dengan bantuan refleksi akal dan ilmu-ilmu manusiawi”.²¹

Sollicitudo Rei Socialis (Keprihatinan akan Masalah Sosial) merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987, dalam rangka memperingati ulang tahun ke 20 Ensiklik *Populorum Progressio* dari Paus Paulus VI. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* atau yang dikenal dengan sebutan SRS ini, merupakan buah pemikiran dan hasil refleksi Paus Yohanes Paulus II tentang keadaan ekonomi global yang terjadi pada tahun 1980-an dan dampak buruk yang ditimbulkan bagi negara-negara berkembang, serta berbagai kendala yang menghambat perkembangan dan kesetiakawanan guna menjadikan kehidupan bangsa-bangsa lebih manusiawi.²²

Dua ensiklik besar SRS (*Sollicitudo Rei Socialis*) dan PP (*Populorum Progressio*) yang ditulis oleh dua pemimpin Gereja Katolik; Paus Yohanes Paulus II dan Paus Paulus VI, secara khusus menyoroti konsep pembangunan bangsa-bangsa yang harus diarahkan kepada usaha untuk memerangi situasi kemiskinan, kemelaratn dan keterbelakangan demi pemulihan martabat manusia. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II secara khusus mengingatkan semua manusia akan persoalan kemiskinan serta segala penyebab dan dampaknya. Karena itu, aktualitas Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* sesungguhnya adalah menawarkan pemahaman baru atas persoalan pokok yang dibahas dalam *Populorum Progressio* yakni pembangunan bangsa-bangsa di dunia ketiga yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan.²³

²⁰ Paus Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis*, penerj. P. Turang Pr (Jakarta: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia, 1988), art. 1, hlm. 7.

²¹ *Ibid.*

²² Agustinus Dwi Riyanto, “*Sollicitudo Rei Socialis*”, dalam *academiaedu*, https://www.academia.edu/9829535/Sollicitudo_Rei_Socialis, pdf, diakses pada 28 Agustus 2025.

²³ Mali Benyamin Michael, “Keberpihakan Kepada Orang Miskin Menurut Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*,” *Respons: Jurnal Etika Sosial*, Vol. 18, No. 02 (Jakarta: Desember, 2013), hlm. 318.

Bagi Paus Yohanes Paulus II, fakta-fakta tentang pembangunan bangsa-bangsa hingga saat ini masih bermasalah terutama dalam kaitannya dengan motivasi dan tujuan dari pembangunan tersebut. Dasar utama pemikiran Paus Yohanes Paulus II adalah belum terwujudnya nilai-nilai kesejahteraan sosial yang tercapai dalam kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam konteks kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang.²⁴ Berbagai persoalan kemiskinan dan keterbelakangan ini tergolong dalam persoalan yang sulit diatasi. Karena itu, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa persoalan-persoalan ini timbul akibat dari kesalahan-kesalahan berat dalam sistem pengelolaan negara berkembang terutama dalam kaitannya dengan keputusan politik yang diambil atau ditentukan oleh para penguasa.²⁵

Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menjadikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan sebagai isu sentral dan pokok perhatian Gereja Universal. Paus Yohanes Paulus II menegaskan pentingnya penerapan sebuah konsep pembangunan yang otentik guna mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan ini.²⁶ Selanjutnya, Paus Yohanes Paulus II menekankan tiga konsep pembangunan yang otentik yakni: *pertama*, pembangunan yang menyeluruh. Bagi Paus Yohanes Paulus II, pembangunan bukan semata-mata tentang persoalan ekonomi, melainkan juga tentang persoalan sosial, etis dan kultural. Berbagai masalah seputar pembangunan tidak bisa diatasi hanya dengan berbagai konsep ekonomi semata, tetapi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial, moral dan nilai kulutural. *Kedua*, berbagai persoalan sosial budaya memiliki jangkauan berskala mondial karena semakin meningkatnya hubungan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa. *Ketiga*, pembangunan berkaitan erat dengan perdamaian dunia, sehingga Paus Yohanes Paulus II menyebut pembangunan bangsa-bangsa sebagai sebuah nama baru untuk perdamaian.²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm. 319.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ SRS art. 17.

²⁷ Mali Benyamin Michael, *op. cit.*, hlm. 321.

Salah satu pokok penting yang dijelaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam kaitannya dengan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat di negara-negara berkembang adalah Gereja pada dasarnya tidak mempunyai cara-cara pemecahan teknis dalam menangani persoalan keterbelakangan. Cara-cara pemecahan yang dimaksudkan oleh Paus Yohanes Paulus II adalah tawaran Gereja untuk menerapkan suatu sistem ekonomi politik khusus yang melibatkan satu pihak atau kelompok tertentu dengan harapan bahwa martabat manusia dihormati.²⁸

Sebagai sebuah institusi keagamaan, Gereja pada praktiknya tidak hanya berfokus pada satu persoalan saja, tetapi juga turut mengembangkan aspek dari misi religiositasnya di pelbagai bidang terutama berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas manusia zaman ini merentangkan berbagai usahanya dalam mencari kebahagiaan yang mungkin tercapai di dunia dan sejalan dengan martabatnya sebagai persona dan citra Allah.²⁹ Pemaknaan ini turut menempatkan Gereja sebagai sebuah institusi kemanusiaan yang mengutamakan karya evangelisasi kepada semua orang di zaman ini yakni tentang kodrat, kondisi-kondisi, tuntutan-tuntutan, dan tujuan dari perkembangan sejati dengan segala kendala yang ada, sehingga dengan demikian, Gereja pada titik ini memenuhi tugas perutusannya untukewartakan Injil kepada semua manusia, yang di dalamnya terkandung usaha untuk mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalan yang mendesak. Dengan ini, Gereja terlibat aktif dalamewartakan kebenaran Kristus, kebenaran tentang Gereja dan manusia yang teraktualisasi sepenuhnya dalam situasi konkret manusia.³⁰

Telaah terhadap Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dalam kaitannya dengan persoalan kemiskinan pernah dibuat oleh beberapa penulis, antara lain Mali Benyamin Michael dengan judul artikel “Keberpihakan Kepada Orang Miskin Menurut Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*”; Fransiska Evangelia Dede, dkk, dengan judul artikel “*Sollicitudo Rei Socialis*: Tonggak Penting dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”;

²⁸ SRS art. 41.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

R. F. Bhanu Viktorahadi, dkk, dengan judul artikel “Cara Pandang Gereja terhadap Kemiskinan dan Pembangunan”.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mali Benyamin Michael membahas secara komprehensif keberpihakan Gereja terhadap orang miskin. Menurutnya, tanggapan Gereja atas persoalan kemiskinan merupakan sebuah tindakan profetis. Selain itu, Mali Benyamin Michael menjelaskan bahwa keberpihakan Gereja terhadap persoalan kemiskinan tidak dipahami dalam konteks perjuangan membela kemiskinan, tetapi berada bersama orang miskin dan berjuang bersama mereka untuk sebuah kehidupan yang layak. Perjuangan Gereja ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial terhadap sesama yang menderita. Gereja sangat mengedepankan upaya terciptanya pribadi manusia yang bermartabat dan terbebas dari belenggu-belenggu sosial seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Objek penelitian Mali Benyamin Michael sangat umum yakni orang miskin secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu seperti umat paroki yang terdapat dalam kajian penulis. Di samping itu, tulisan ini lebih berfokus pada kajian tentang kemiskinan ekonomi yang dialami oleh umat Paroki St. Petrus Tanggar dalam terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan implikasinya bagi karya pastoral Gereja lokal.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Fransiska Evangelia Dede, dkk membahas esensi utama Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* sebagai tonggak utama dalam menghadapi tantangan globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Fransiska Evangelia Dede, dkk menjelaskan bahwa di tengah situasi ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* turut mempromosikan perubahan dengan mendorong Gereja agar terlibat secara aktif melalui perjuangan keadilan sosial, solidaritas dan tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas manusia. Objek penelitian Fransiska Evangelia Dede, dkk sangat umum yakni masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan, penulis lebih memfokuskan perhatian pada upaya untuk membaca persoalan kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar, dan membuat sebuah analisis atas persoalan tersebut dalam terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*.

Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh R. F. Bhanu Viktorahadi, dkk, menjelaskan cara pandang Gereja terhadap persoalan kemiskinan dan pembangunan. Menurut R. F. Bhanu Viktorahadi, dkk, Gereja pada hakikatnya tidak pernah abai dalam menanggapi isu-isu seputar kemanusiaan. Tanggapan Gereja selalu bertitik tolak dari refleksi teologis tentang eksistensi Gereja di tengah dunia yakni menjadi tanda kehadiran Allah yang membebaskan manusia dari belenggu dosa dan penderitaan. Objek penelitian Bhanu Viktorahadi dkk sangat umum, sedangkan objek penelitian dalam tulisan ini adalah kelompok umat tertentu yang diteliti dan diamati melalui pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tulisan penulis ini berbeda dengan tulisan-tulisan dari penulis sebelumnya, baik dari tema tulisan maupun lokasi penelitiannya. Dalam konteks ini, para penulis sebelumnya belum pernah mendalami fenomena atau persoalan kemiskinan pada sebuah kelompok tertentu sebagai objek kajian dan penelitian dan menganalisisnya dalam terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, serta membahas implikasinya bagi karya pastoral Gereja lokal. Oleh karena itu, penulis akan mendalami ketiga hal tersebut dalam tesis ini dengan judul: **“Kemiskinan Umat Paroki St. Petrus Tanggar dalam Terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan Implikasinya bagi Karya Pastoral Gereja Lokal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar dianalisis dalam terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan apa implikasinya bagi karya pastoral Gereja lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, menganalisis persoalan kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar berdasarkan perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan menunjukkan implikasinya bagi karya pastoral Gereja lokal. *Kedua*, untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar magister dalam bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Secara terperinci, tujuan utama dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum tentang Paroki St. Petrus Tanggar
2. Memahami konsep kemiskinan dan isi pokok Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dari Paus Yohanes Paulus II.
3. Mendeskripsikan persoalan atau fenomena kemiskinan di Paroki St. Petrus Tanggar khususnya berkaitan dengan sebab-sebab dan dampak kemiskinan bagi umat.
4. Menganalisis persoalan kemiskinan di Paroki St. Petrus Tanggar berdasarkan Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*.
5. Menunjukkan implikasinya bagi karya pastoral Gereja Lokal.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

Sebagai seorang calon imam misionaris dalam Serikat Sabda Allah, penulis akan senantiasa tinggal dan hidup berdampingan dengan umat serta turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, tulisan ini bermanfaat bagi penulis untuk belajar sambil menyediakan bekal bagi hati dan pikiran untuk menjalani karya pelayanan di tengah umat di tempat penulis akan diutus.

1.4.2 Bagi Gereja

Gereja sebagai sebuah institusi tidak pernah bisa terlepas dari aspek sosialnya yakni hidup dan berkarya di tengah manusia yang memiliki ragam latar belakang. Gereja juga menampilkan diri sebagai harapan baru bagi umat yang sedang dalam

kondisi atau keadaan hidup yang memprihatinkan, secara khusus dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini bermanfaat bagi Gereja untuk mengetahui secara komprehensif tentang persoalan kemiskinan ekonomi di tengah umat. Selain itu, tulisan ini juga dapat menjadi literatur untuk memperkaya penelitian Gereja lokal tentang kemiskinan ekonomi umat.

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Tulisan ini menyajikan data-data tentang fakta kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar serta tanggapan Gereja dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* tentang kemiskinan ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini bermanfaat sebagai referensi, pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti selanjutnya. Lebih dari itu, peneliti selanjutnya dapat menjadikan tulisan ini sebagai dasar sekunder untuk penelitian yang lebih mendalam, sembari memberikan masukan atau kritikan atas kekurangan dan kelemahan dari tulisan ini, sehingga dengan demikian peneliti selanjutnya dapat menghasilkan dan menemukan pengetahuan atau wawasan yang dalam dan lebih aktual.

1.5 Metode Penulisan

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumen sebagai alat atau metode pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif dinilai sebagai sebuah investigasi sistematis terhadap sebuah fenomena melalui proses pengumpulan data yang dapat diukur dan dinilai melalui teknik statistik, matematika atau komputasi.³¹

Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

³¹ Karimudin Abdullah dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 1.

ditetapkan.³² Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, dengan menggunakan konsep atau teori tertentu untuk menjawab rumusan masalah, sehingga peneliti dapat merumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian digunakan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.³³

Secara teoretis, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat naturalistik (fenomenologis). Penelitian kualitatif berfokus pada gejala sosial yang tidak dapat diukur dengan metode statistik. Jenis penelitian kualitatif ini menekankan metode observasi dan wawancara lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis melalui pendekatan non-statistik. Di samping itu, metode penelitian kualitatif juga berfokus pada makna dan pemahaman dari dalam, teknik penalaran, definisi atau gambaran tentang situasi tertentu, serta meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode penelitian kualitatif dinilai dapat menjelaskan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh.³⁴

³² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakarta: Nadi Pustaka, 2010), hlm. 9.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, antara lain:

Bab satu berisi pendahuluan. Pada bagian ini, penulis akan mengulas beberapa hal penting antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan, serta ruang lingkup dan keterbatasan studi serta hipotesis penelitian.

Bab dua berisi uraian dan penjelasan tentang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, khususnya berkaitan dengan biografi Paus Yohanes Paulus II, konteks historis, garis besar Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, kemiskinan ekonomi dari perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* serta penyebab kemiskinan dari perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*.

Bab tiga berisi penjelasan tentang kemiskinan ekonomi di Paroki St. Petrus Tanggar. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan konsep kemiskinan, secara khusus pengertian, penyebab dan dampaknya. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar seperti sejarah singkat Paroki St. Petrus Tanggar dan gambaran umum kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar yang meliputi: jumlah dan persentase umat miskin, distribusi geografis, mata pencarian umat, fasilitas sosial dan infrastruktur dasar dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

Bab empat merupakan bagian inti dari penulisan tesis ini. Penulis akan membuat sebuah analisis atas persoalan kemiskinan ekonomi umat Paroki St. Petrus Tanggar berdasarkan perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, serta implikasinya bagi karya pastoral Gereja Lokal.

Bab lima berisi penutup. Pada bagian ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan serta usul dan saran yang bermanfaat guna melengkapi maksud dan tujuan penulisan tesis ini.

1.7 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Studi

Objek penelitian ini adalah umat Paroki St. Petrus Tanggar mencakup penduduk berusia 18 tahun ke atas yang sudah bekerja baik laki-laki maupun perempuan. Subjek penelitian adalah Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Kemiskinan dan Umat Paroki St. Petrus Tanggar. Penelitian ini berlokasi di wilayah Paroki St. Petrus Tanggar yang mencakup empat stasi besar yakni Stasi Nggari, Stasi Nul, Stasi Lento dan Stasi Menge. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Quota non-probability sampling yang dilakukan melalui pemilihan 100 orang responden yang berasal dari empat stasi besar dalam wilayah Paroki St. Petrus Tanggar.

Prosedur pengumpulan data dalam tulisan ini melalui langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, kuesioner: penulis membuat kuesioner yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan poin-poin penting dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*. Selanjutnya, penulis menyebarkan kuesioner tersebut kepada responden (umat Paroki St. Petrus Tanggar), untuk memperoleh berbagai pandangan luas tentang pemahaman mereka terhadap persoalan kemiskinan; penyebab dan dampaknya. *Kedua*, wawancara: penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan utama seperti pastor paroki, para ketua dan anggota DPP Paroki St. Petrus Tanggar serta kepala desa. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penting berkaitan persoalan kemiskinan umat, tanggapan Gereja serta data-data umat miskin. *Ketiga*, studi Pustaka: penulis membaca dan mendalami secara komprehensif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan tulisan-tulisan tentang kasus kemiskinan ekonomi umat yang terdapat dalam berbagai literatur baik buku, artikel jurnal dan dokumen-dokumen penting Gereja yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan umat.

1.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pokok persoalan yang dijelaskan pada latar belakang masalah, dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, penulis dapat membuat sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut: Persoalan kemiskinan umat Paroki St. Petrus Tanggar dapat dianalisis menggunakan perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*.